

**SKRIPSI**

**STRATEGI POLITIK TOMEPAYUNG ARAJANG BALANIPA KE II  
DALAM MENGHADAPI PERLAWANAN KERAJAAN PASSOKKORANG**

**DENI SUANDI**

**F.01 16 528**

**Diajukan Sebagai Syarat Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik ( S.IP)  
Pada Program Studi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI POLITIK TOMEPAYUNG ARAJANG BALANIPA  
KE-2 DALAM MENGHADAPI PERLAWANAN KERAJAAN  
PASSOKKORANG  
NAMA : DENI SUANDI  
NIM : F0116528  
PRODI : ILMU POLITIK  
FAKULTAS : ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk ujian akhir skripsi memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 22 Mei 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Muhammad, S.IP., M.Si**  
NIP. 198707022015041001

Pembimbing II



**Asriani, S.IP., M.Si**  
NIP: 198406242019032017

Mengetahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sulawesi Barat



**Dr. H. Burhanuddin, M.Si**  
NIP. 196209191989031004

**SKRIPSI**

**STRATEGI POLITIK TOMEPAYUNG ARAJANG BALANIPA KE-2  
DALAM MENGHADAPI PERLAWANAN KERAJAAN PASSOKKORANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

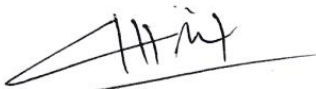
**DENI SUANDI**  
**F01 16 528**

Telah diajukan di depan Dewam Penguji

Pada tanggal 22 Mei 2023


**Susunan Dewan Penguji:**

Pembimbing I



**Muhammad, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198707022015041001

Penguji I



**Zamuddin Losi, S.IP., M.Litt.**  
NIP. 197903222021211004

Pembimbing II



**Asriani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 198406242019032017

Penguji II



**Aco Nata Saputra S.IP., M.Si.**  
NIP. 198709232019031007

Penguji III



**Pahrudin, S.IP., M.Si.**  
NIP. 001107803

## ABSTRAK

**Deni Suandi. NIM F0116528. Strategi Politik Tomepayung Arajang Balanipa Ke-2 Dalam Menghadapi Perlawanan Kerajaan Passokkorang.** Dibimbing oleh Pembimbing Utama **Muhammad, S.Ip., M.Si.** dan Pembimbing Pendamping **Asriani S.Ip., M.Si.**

Strategi politik merupakan strategi yang digunakan dalam merealisasikan cita-cita politik, penyusunan dan perencanaannya tersusun secara terencana dan baik. Strategi politik digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, tujuan khususnya adalah “kemenangan”. Untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan metode perencanaan dalam strategi politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam strategi politik Tomepayung tersimpan tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenangan”. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan dalam strategi politik yakni untuk menghadapi kerajaan Passokkorang. Tomepayung dalam membangun strategi menghadapi kerajaan Passokkorang yang begitu kuat, menggunakan metode perencanaan politik dengan mengupayakan dan memposisikan kerajaan Balanipa berdasarkan realita lingkungan operasionalnya. Strategi politik yang digunakan oleh Tomepayung Arajang Balanipa ke-2 dalam menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang adalah Strategi bekerjasama dalam setiap langkah (Cooperatif Stategy) dan strategi kejutan (Shcok Politcal Strategy). Kedua strategi politik ini digunakan dalam menghimpun kekuatan menghadapi serangan/perlawanan kerajaan Passokkorang.

Kata kunci : Strategi Politik, Tomepayung, Passokkorang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mandar adalah salah satu dari empat suku besar di Sulawesi Selatan, selain Bugis, Makassar dan Toraja. Pada masa kejayaan-kerajaan tempo dulu di Sulawesi Selatan terdapat tiga kerajaan besar yang dikenal dengan sebutan *Tellu Boccoe*, yaitu Mangkau ri Bone, Sombayya ri Gowa, dan Payung ri Luwu. Kemudian di jazirah Mandar terdapat pula kerajaan besar dan berpengaruh pada zamannya, yaitu Kerajaan Balanipa yang dikenal dengan Arajang di Balanipa.

Kerajaan-kerajaan di daerah Mandar yang kini telah dikenal dengan provinsi Sulawesi Barat, jauh sebelum masa kolonial Hindia Belanda, telah menata kehidupan kenegaraannya, tidak pernah luput dari gejolak sosial berupa konflik baik internal maupun eksternal, sehingga dinamika kesejarahannya senantiasa diwarnai oleh perang dan damai. Oleh karena itu, hubungan antar kerajaan di daerah ini, tidak hanya diwarnai oleh konflik, tetapi juga tidak sedikit dan bahkan melahirkan puluhan konsensus berupa perjanjian perdamaian atau kerjasama antar kerajaan.<sup>1</sup> Pada umumnya konsensus yang mendasari hubungan antar kerajaan di Mandar, tidak hanya berlandaskan pada semangat integrasi atau persatuan dan kesatuan, tetapi juga pada sikap toleransi dan persaudaraan.

---

<sup>1</sup> Sjarifuddin, Kerajaan-Kerajaan di Daerah Mandar. 1998.h.187

Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta tuntutan pemekaran wilayah, maka saat ini Mandar berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi Sulawesi Barat. Ini berdasarkan *Undang-Undang No 26 Tahun 2004* tentang Provinsi Sulawesi Barat dengan tiga kabupaten tambahan, sehingga menjadi enam. Keenam kabupaten tersebut di atas adalah Polewali Mandar (Polman), Mamasa (hasil pemekaran Kabupaten Polman), Majene, Mamuju, Mamuju Tengah (hasil pemekaran Kabupaten Mamuju) dan Mamuju Utara/Pasangkayu (juga hasil pemekaran Kabupaten Mamuju).

Jauh sebelum Hindia Belanda menjajah di Tanah Air, di Mandar sudah memiliki sistem pemerintahan yang merdeka dan berdaulat pada kerajaan-kerajaan yang ada. Terbagi atas dua kelompok, yaitu Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. Secara harfiah "*Pitu Ba'bana Binanga*" adalah tujuh muara sungai, tujuh kerajaan di bagian pesisir pantai daerah Mandar. Dan sebaliknya *Pitu Ulunna Salu* arti harfiahnya tujuh hulu sungai, maksudnya tujuh kerajaan di bagian pegunungan daerah Mandar.

Awal berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Mandar, hingga beberapa waktu silam belum dapat dipastikan. Namun menurut sejarawan Zainal Abidin Farid bahwa khususnya Kerajaan Balanipa di Mandar sudah ada sejak abad ke-IX sebagaimana bersumber pada naskah La Galigo. Namun setelah pada suatu ketika timbul kekacauan berlarut-larut yang sulit diatasi, seorang putra tanah Mandar yang tidak lain adalah keturunan dari Tomakaka Napo bernama I Manyambungi

bergelar Todilaling mampu meredam kekacauan tersebut sekaligus bisa memulihkan keadaan seperti semula, sehingga atas keberhasilannya itu ia diangkat menjadi raja pertama di Balanipa.

Setelah I Manyambungi dilantik menjadi Arajang Balanipa, beliau mulai menata pemerintahan dan bergiat menyatukan banua-banua (negeri-negeri) di sekitarnya menjadi bagian dari Kerajaan Balanipa. Maka mulailah saat itu diadakan perhitungan yang baru tentang awal berdirinya kerajaan Balanipa di Mandar yang diperkirakan terjadi pada permulaan abad XV hampir bersamaan dengan masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 yakni Daeng Matanre Karaeng Tumappa'risi Kalonna.

I Manyambungi kawin di Gowa dengan Karaeng Surya ( I Sorai), putri dari Karaeng Sanrobone Takalar yang juga adalah cucu dari Raja Gowa. Dari perkawinan itu lahir seorang putra yang diberi nama *Billa-Billami* yang setelah dewasa menjadi Raja ke-2 Balanipa dan menyandang gelar "*Tomepayung*" menggantikan Ayahandanya. Periode kepemimpinan I Manyambungi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah pemerintahan di Mandar.

Pada Periode tersebut merupakan awal kelahiran demokrasi di Mandar. Presistensi yang terjadi ketika Kerajaan Passokkorang berkuasa di Mandar memicu segala aktivitas politik yang terjadi pada periode tersebut. Masyarakat yang pada mulanya sangat tunduk kepada Tomakaka Passokkorang dengan corak

pemerintahan totalitariannya, akhirnya melakukan perlawanan. Akan tetapi, I Manyambungi dalam upaya perluasan wilayah kekuasaan Balanipa, hanya Tomakaka Passokkorang yang belum berhasil ditaklukkannya hingga akhir hayatnya.<sup>2</sup>

Setelah Tomepayung resmi memangku jabatan sebagai Arajang (Raja) Balanipa yang kedua menggantikan ayahandanya, mulai melanjutkan kembali kebijakan dan perjuangan pendahulunya serta menyusun strategi politik dalam upaya perluasan wilayah kekuasaan Balanipa dan berhasil menaklukkan Tomakaka Passokkorang, suatu negeri yang dikisahkan cukup besar, menguasai lahan pertanian yang luas dan perdagangan maritim dengan pusat pemerintahan di sekitar daerah Mapilli (nama salah satu kecamatan di kabupaten Polewali Mandar). Setelah negeri Passokkorang ditaklukkan, negeri-negeri kekuasaannya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Balanipa.<sup>3</sup>

Berdasar pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Strategi Politik Tomepayung Arajang (Raja) Balanipa ke-2 yang berhasil menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang yang jaya pada waktu itu. Tentunya seorang raja seperti Tomepayung, memiliki keberanian dan ketegasan seperti ayahandanya I Manyambungi raja ke-1 Balanipa. Melawan kerajaan Passokkorang yang kuat bukanlah hal mudah, namun membutuhkan strategi untuk menaklukkannya. Tidak lain strategi itu adalah strategi politik yang lahir dari kekuatan persatuan dan kesatuan antar kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Mandar.

---

<sup>2</sup> Saidong dalam Muhammad Amir. Assitalliang Tammajarra di Mandar Abad Ke-16. 2018. h.78

<sup>3</sup> H.M. Tanawali Azis Syah. Sejarah Mandar : Polmas, Majene, Mamuju. 1997. h.64



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Strategi Politik Tomepayung Arajang (Raja) Balanipa ke-2 dalam menghadapi Perlawanan kerajaan Passokkorang”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui secara detail Strategi Politik yang digunakan oleh Tomepayung Arajang (Raja) ke-2 Balanipa dalam menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang;
- b. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada publik mengenai dampak dari Strategi Politik Tomepayung Arajang (Raja) ke-2 Balanipa yang digunakan saat menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang;
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis sesuai disiplin ilmu yang digeluti di Universitas Sulawesi Barat yakni jurusan ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik;
- d. Untuk menambah kekayaan inventaris karya tulis mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dan pada umumnya ilmu pengetahuan;
- e. Menjadikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini, adalah :

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi di Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan terkhusus bagi Jurusan ilmu politik;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi referensi yang valid bagi pemerintah daerah di Polewali Mandar pada khususnya, dan di Sulawesi Barat pada umumnya, sehingga bisa di jadikan perbandingan dan pembelajaran terhadap masyarakatnya.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa strategi politik Tomepayung raja ke-2 Balanipa dalam menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang adalah mengandung nilai-nilai pendidikan, politik, serta sejarah dan kebudayaan;
- b. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya serta dapat memberikan inspirasi kepada setiap mahasiswa pada umumnya agar lebih memperhatikan kelangsungan hidup sejarah dan kebudayaan serta masyarakatnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Strategi Politik**

Strategi politik tidak terlepas dari pengertian 2 (dua) kata yakni strategi dan politik. Keduanya memiliki penjelasan yang saling mengikat satu sama lain. Berikut uraian singkat kedua kata tersebut :

##### **2.1.1 Pengertian Strategi Politik**

###### **1. Strategi**

Kata strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer, secara etimologis berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu “*Strategos*” yang berarti pasukan dan “*Agein*” yang berarti memimpin atau *Strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan.<sup>4</sup>

Dalam Wikipedia Indonesia, pengertian Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan". Strategi merupakan seni yang berhubungan dengan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk melibatkan semua sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan efisien.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Schrodgers dalam Anggara : Strategi Politik (Edisi Revisi untuk Pemilu). 2014. h.17

<sup>6</sup> Hafied Canagara, 2014. Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi. Jakarta : Raja Grafindo Persada. h. 29.

Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedang perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Marthin-Anderson, menjelaskan bahwa strategi adalah seni yang melibatkan kemampuan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal serta efisien.

Dari pengertian umum di atas, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi, social-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Banyak tujuan strategi khususnya di bidang politik, antara lain berlomba untuk memperkaya diri, pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan, atau pertarungan untuk mendapatkan tujuan yang tersembunyi. Strategi selalu berdasar pada tujuan untuk “kemenangan”.

Terwujudnya suatu strategi pada dasarnya melalui 4 (empat) tahapan, antara lain :

- a. *Tahap pertama* yakni keputusan, yaitu perbuatan intelektual yang diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan;
- b. *Tahap Kedua* yakni Peralatan Politik meliputi diplomasi, kebijakan (politik), pertahanan ekonomi, peralatan psikologi dan angkatan

bersenjata. Peralatan ekonomi meliputi semua potensi ekonomi masyarakat;

- c. *Tahap Ketiga* yakni Pelaksanaan yaitu, perbuatan teknis. Strategi mengalami evolusi dari pengertian sempit ke pengertian luas. Dalam pengertian sempit, strategi diartikan sebagai seni menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh politik. Secara luas strategi diartikan sebagai seni menggunakan berbagai kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh politik;
- d. *Tahap Keempat* yakni Penilaian adalah perbuatan intelektual. Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.

## 2. Politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Politeai*". "*Politeai*" berasal dari kata "*polis*" yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan "*teai*" yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu "*politics*" dan "*policy*" menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu

rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu.

Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi dan alokasi sumber daya.

Beberapa pendapat ahli di bawah ini mengenai politik secara terminologi antara lain : Menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut F. Isjwara, politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Dan menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Pengertian Politik secara umum dapat dipahami sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari aktivitas manusia dalam kehidupan bernegara dari segala aspek seperti kekuasaan, pengaruh, kekuatan, wewenang, kebijakan,

pengaturan, pengambilan keputusan, alokasi, pemerintahan dan kepentingan. Jadi ilmu politik itu mencakup telaah atau studi yang luas.

Beberapa pengertian atau definisi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang ingin dicapai dan merupakan salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan-keinginan.

Pandangan yang lain mengenai politik, juga dikemukakan Delia Noor (dalam dasar-dasar ilmu politik) yang merumuskan definisi ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Secara prinsip, politik mengacu pada masalah pengelolaan dan kepemimpinan yang meniscayakan pengaturan dan implementasi kehendak dan kekuasaan dalam penataan urusan-urusan masyarakat. masyarakat di mana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik.

Dari berbagai penjelasan kata strategi dan politik di atas, maka dapatlah kita pahami bersama bahwa strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, contohnya pemberlakuan peraturan baru, pembentukan struktur baru dalam administrasi pemerintahan, melaksanakan program desentralisasi.

Strategi politik digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau cita-cita politik tidak akan terwujud. Ketika politik dipandang sebagai unsur substansial dalam pengertiannya yang global serta diposisikan sejajar dengan dua unsur substansial lainnya, yaitu kebudayaan dan ekonomi. Politik merupakan pembinaan dan penuntunan masyarakat, kepedulian kepada semua kepentingan masyarakat, perhatian kepada semua dimensi manusia dan masyarakat.

Politik membimbing masyarakat kepada arah yang mendatangkan mashlahat bagi mereka, kebaikan bagi bangsa mereka dan kebaikan bagi individu-individu yang ada. Definisi tersebut memiliki daya jangkau semua dimensi kepribadian manusia: yang meliputi ruh, pikiran dan perbuatan, serta semua aspek kemasyarakatan: yang meliputi kebudayaan, politik dan ekonomi.

### **2.1.2 Metode Perencanaan Strategi Politik**

Strategi politik mempunyai tujuan khusus, salah satunya adalah “kemenangan”. Sehingga untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan suatu metode perencanaan dalam strategi politik. Menurut Peter Schroder, bahwa terdapat 4 (empat) perencanaan strategi, yaitu :

1. *Pendekatan Metodologis*, yakni Kemiliteran, Berorientasi Pasar, Politis)

Dalam pendekatan ini terdapat gambaran yang memiliki makna masing-masing ada perbedaan dan persamaan. Pendekatan tersebut saling



berpotongan tidak hanya karena dalam persamaan metodologinya, tetapi juga karena beberapa menjadi bagian dari strategi lainnya. Dengan demikian strategi militer dapat selalu menjadi bagian dari strategi politis, dan sebuah strategi politis juga selalu merupakan strategi pasar.

## *2. Model Kemiliteran.*

Untuk lebih menghargai penerapan strategi militer atas strategi lainnya, seseorang perlu memiliki beberapa pengetahuan dasar mengenai konsep dan prinsip perang. Menurut Wylie, tujuan awal seorang perencana strategi dalam perang adalah memiliki kontrol atas musuhnya. Kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang dimanipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak ke arah yang menguntungkan si perencana strategi dan merugikan musuh.

Titik berat perang menentukan hasil perang tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama strategi adalah memindahkan titik berat perang bagi keuntungan pihak sendiri. Hal ini tergantung pada beberapa factor : Hakekat perang, tempat dan waktu perang, serta bobot titik berat.

## *3. Model Perencanaan Korporasi.*

Perencanaan korporasi merupakan analisa sistematis dan perumusan tujuan yang mengarah ke depan, yang mencakup cara dan pilihan-pilihan bersikap, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi-instruksi untuk merealisasikannya secara rasional.

#### 4. Model Perencanaan Politis.

Dalam proses perencanaan politis terdapat pola yang diutamakan yaitu: Perencanaan strategi melakukan upaya untuk memposisikan organisasi berdasarkan realita lingkungan operasionalnya. Ada dua jenis lingkungan :

- a. *Lingkungan Eksternal*, yang merupakan wilayah dimana kekuatan atau faktor lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi tersebut;
- b. *Lingkungan Internal*, yang terdiri atas sumberdaya-sumberdaya, kekuatan, peluang, serta tuntutan dari dalam organisasi itu sendiri. Perencanaan strategi harus mampu mengenali dan menilai peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal yang berhubungan dengan visi, serta tujuan akhir organisasi.

#### 2.1.3. Jenis-Jenis Strategi Politik

Untuk memahami lebih lanjut mengenai strategi politik, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis-jenis strategi politik itu sendiri. Jenis-jenis strategi politik, antara lain :

1. *Strategi Defect*, yakni menolak kerjasama dalam setiap langkah yang diambil;
2. *Strategi Cooperate*, yakni Bekerjasama dalam setiap langkah yang diambil;

3. *Strategi Random*, yakni Posisinya ditengah-tengah, menerima atau menolak;
4. *Strategi Per Kind*, yakni Periodik (bekerja sama-bekerja sama-menolak bekerja sama);
5. *Strategi Per Nasty*, yakni Periodik (menolak-menolak-bekerja sama);
6. *Strategi Spite*, yakni Bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian selama lawan masih bisa diajak kerjasama, terakhir menolak kerja sama;
7. *Strategi Majority*, yakni Memainkan langkah yang paling sering dimainkan lawan, apabila langkah yang diambil serupa, maka bekerja sama;
8. *Strategi Tit For Tat*, yakni Bekerja sama dalam langkah yang pertama-dalam langkah-langkah berikutnya mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir;
9. *Strategi Kejutan (Shock Political Strategi)*, yakni Keberhasilannya terletak pada betapa tidak siapnya musuh menghadapi kejutan yang kita buat;
10. *Strategi Disinformasi*, yakni manipulasi informasi dengan memberikan informasi dalam keadaan ofensif dan memberikan informasi secara berlebihan/melebih-lebihkan informasi (dalam keadaan defensif);
11. *Strategi Pengakuan* yakni menciptakan opini transparansi terdzalim.

## 2.2. Kerajaan Balanipa

Awal berdirinya Kerajaan Balanipa Mandar bermula dari persekutuan " *Appe Banua Kaiyang* " (Empat Negeri Besar) yaitu : Napo, Samasundu, Mosso dan Todang Todang. Keempat Banua Kaiyang tersebut sepakat mendirikan kerajaan Balanipa di Mandar dengan mengangkat I Manyambungi, putra Tomakaka Napo sebagai raja pertama. Di bawah pemerintahan I Manyambungi, kerajaan Balanipa Mandar berkembang menjadi besar dan memelopori persekutuan Kerajaan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba'bana Binanga yang wilayahnya meliputi daerah Paku sampai Suremana (Wilayah Sulawesi Barat) .

Di masa mudanya, I Manyambungi pernah menjabat sebagai salah seorang panglima Perang (Tobarani) Kerajaan Gowa di zaman pemerintahan Tumaparissi Kalonna (1510-1546). Pada waktu terjadi pertentangan di wilayah negerinya, lalu ia dipanggil untuk membantu menyelesaikan persoalan internal tersebut. Keberhasilannya menyelesaikan perselisihan yang terjadi itu, menyebabkan ia dipilih dan diangkat menjadi pemegang kendali kekuasaan pertama di kerajaan Balanipa yang dibentuk dari pesekutuan Empat negeri besar (Appe Banua Kaiyyang) yaitu, Napo, Samasundu, Todang Todang dan Mosso, sekitar abad XV tepatnya tahun 1520 M, waktu itu agama Islam belum masuk di Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan Kerajaan ditetapkan di Napo sebagai Ibukota Kerajaan Balanipa suatu wilayah yang sejak lama dikenal sebagai bandar niaga.

Kerajaan Balanipa hampir seusia dengan kerajaan lainnya di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya, seperti : Luwu, Gowa, dan lainnya. Sebelum berbentuk kerajaan, dahulu Kerajaan Balanipa terdiri dari beberapa negeri yang dipimpin oleh tomakaka, yaitu Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang. Dari empat negeri inilah yang sering disebut sebagai cikal bakal lahirnya Kerajaan Balanipa. Dibentuknya persekutuan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari tomakaka yang agresif ingin menguasai tomakaka lain, seperti tomakaka Passokkorang, tomakaka Lenggo, tomakaka Lempong dan tomakaka Tande.

Terbentuknya persekutuan Apeq Banua Kaiyang dibawa kepemimpinan tomakaka Napo, tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga mereka mencari sosok yang dinilai bisa dan mampu menyelamatkan rakyat dan keutuhan wilayah dari ancaman tomakaka yang ingin berkuasa. Pencarian itu tertuju kepada I Manyumbungi yang pada saat itu berada di Kerajaan Gowa.

Kerajaan Balanipa dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu makin berkembang disusul datangnya berbagai penduduk dari negeri lain untuk bermukim disana. Dalam perkembangannya, Kerajaan Balanipa Mampu menjadi pemegang supremasi politik sekaligus pemeran penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Mandar.

Dibawah pimpinan I Manyambungi, persekutuan Apeq Banua Kaiyang berubah menjadi Kerajaan Balanipa, dan berubah pula nama gelar pimpinan yang

sebelumnya dikenal dengan Tomakaka menjadi Pappuangan ( seseorang yang dipertuankan) yaitu pappuangan Napo, pappuangan Samasundu, pappuangan Mosso dan pappuangan Todang-Todang. Masing-masing mereka mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Selain sebagai pemimpin daerah pappuangan juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan dewan ada' kaiyyang (adat besar). Dewan Ada' Kaiyyang yang kemudian berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan seorang raja atau mara'dia pada Kerajaan Balanipa.

Berdirinya Kerajaan Balanipa tidak bisa dipisahkan dari nama I Manyambungi (Todilaling). Ia adalah seorang pahlawan bagi masyarakat Appe' Banua Kaiyang yang menyelamatkan negerinya dari kehancuran dan merubah negeri itu menjadi kerajaan yang besar dan kuat di wilayah Mandar. Sebelum I Manyambungi resmi menjadi mara'dia atau raja terlebih dahulu harus dilantik dan diambil sumpahnya oleh Puang Dipooyang yang merupakan ketua dari dewan adat besar, mewakili appe banua kaiyang atas nama rakyat.

Pada upacara pelantikan I Manyambungi di *parakka'i* atau dimahkotai dirangkaikan dengan pengucapan ikrar oleh Puang Dipooyang yang berbunyi :

*“Upakaiyangngo'o, mupakaraja', madondong duang bongi anna marrattaso'o uwake', marruppu-ruppu'o batu uwalaiembali akaiyangan”*

*Artinya : Kami angkat engkau menjadi pemegang tampuk pemerintahan, tetapi engkau harus hormati kami, besok lusa manakala engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan aturan dan kebiasaan*

*adat negeri, maka kami akan mengambil kembali kebesaran yang telah diberikan.*

Setelah masing-masing berpegang kepada tiang payung kebesaran dengan mengucapkan sumpah setia yang juga biasa disebut perjanjian assitalliang.

Setelah I Manyambungi resmi menjadi Mara'dia, penataan pada sistem pemerintahannya terus dilakukan, beliau juga berniat untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang terdapat disekitarnya menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Balanipa. Atas usul dan saran dari dewan *Ada' Kaiyyang*, maka *dinobatkan puang Dipooyang* sebagai "*pappuangan Limboro*" menjadi pemangku adat untuk mendampingi mara'dia dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja dalam mengatur pemerintahan yang ada didaerah dataran rendah yang disebut Limboro. Dan selanjutnya diikuti pengangkatan pappuangan Tammangalle atau yang biasa dikenal pappuangan Biring Lembang menjadi pemangku adat kerajaan untuk mendampingi mara'dia dalam mengatur daerah yang ada di pesisir pantai.

Keinginan I Manyambungi untuk mempersatukan Kerajaan-kerajaan yang ada di Mandar belum terwujud sepenuhnya pada masa pemerintahannya, dikarenakan beliau terlebih dahulu wafat. Namun pada saat itu, kerajaan Balanipa sudah menjadi kerajaan yang berkuasa diwilayah Mandar. Setelah I Manyambungi wafat, Ia digantikan oleh anaknya Tomepayung menjadi mara'dia (raja) kedua kerajaan Balanipa. Dibawah pemerintahan Tomepayung kerajaan Balanipa semakin berkembang, hal ini dibuktikan dari bertambah luasnya

wilayah kekuasaan kerajaan Balanipa dari Kerajaan Binuang di bagian timur sampai kerajaan-kerajaan di daerah hulu sungai di bagian utara.

I Manyambungi digantikan oleh putranya yang bernama Tomepayung menjadi maraqdia Balanipa. Setelah Tomepayung secara resmi memangku jabatan sebagai maraqdia Balanipa yang kedua, ia mulai melanjutkan kebijakan pendahulunya dalam perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Balanipa.

### **2.3. Kerajaan Passokkorang**

Kerajaan Passokkorang diperkirakan telah ada pada abad ke-13 M dan menguasai wilayah Mandar dengan kekuatan militer. Pemberontakan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-15 M, setelah rajanya mulai memerintah secara sewenang-wenang. Selain itu, kerajaan ini juga mulai memperluas wilayah kekuasaannya ke pesisir barat Pulau Sulawesi untuk membuat jalur perdagangan melalui laut Mosso, dan Todang-todang. Pemimpinnya disebut dengan Tomakaka.

Kerajaan Passokkorang terletak di provinsi Sulawesi Barat, wilayah Suku Mandar. Cikal bakal penduduk yang menduduki daerah Mandar adalah kelompok-kelompok masyarakat yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang Tomakaka. Sebelum persekutuan Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu muncul, kerajaan Passokkorang sudah dikenal sebagai kerajaan besar dan kuat, bertempat di lembah aliran sungai Maloso di daerah Mapilli dengan beberapa Sekutunya seperti Tomakaka di Lerang, Tomakaka di Lenggo, Tomakaka di Batu, dan Tomakaka Tande. Mereka sering melakukan



tindakan semena-mena kepada beberapa penduduk di daerah Napo, Mosso, Samasundu, Todang-Todang, dan Limboro. Kerajaan ini sangat kuat dan tak ada satupun Tomakaka atau persekutuan Tomakaka lainnya yang mampu menandingi kekuatan Kerajaan Pasokkorang.

Passokkorang adalah kerajaan besar yang memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Daerah kekuasaannya meliputi wilayah Mapilli dan Campalagian yang dikenal dengan sebutan “*tallumbanua*”. Sedangkan pusat kerajaannya terletak di wilayah Mapilli. Kerajaan ini besar karena ia mampu mengakomodasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai etnis luar, seperti etnis Gowa dan Bone.

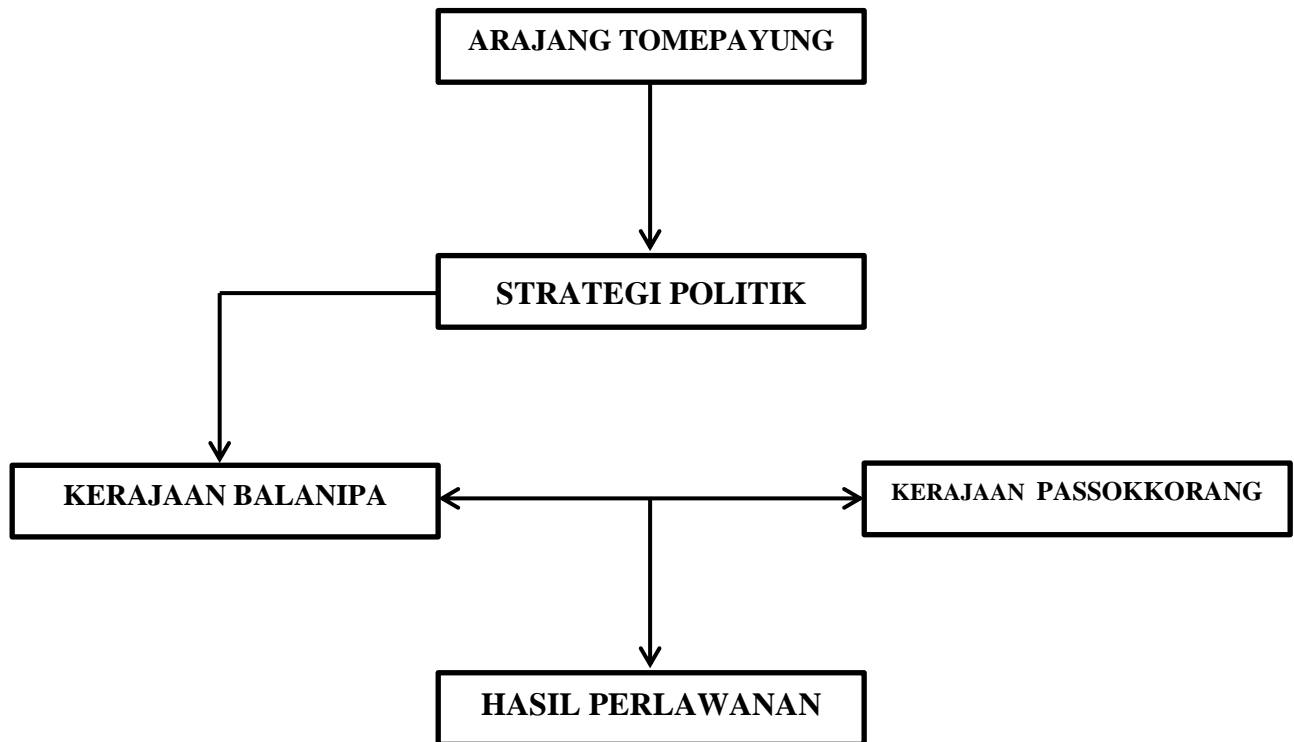
Kerajaan Passokkorang semakin hari semakin besar dan kuat secara ekonomi dan politik membuat kerajaan Balanipa dan kerajaan lainnya merasa terancam eksistensinya, apalagi Passokkorang merupakan kerajaan yang berdiri lama di tanah Mandar. Atas dasar itu, pembesar Balanipa dan para pembesar kerajaan lainnya, kemudian bekerja sama untuk menyusun strategi dalam rangka menyerang kerajaan Passokkorang.<sup>6</sup>

---

<sup>8</sup> H.M. Tanawali Azis Syah. Sejarah Mandar : Polmas, Majene, Mamuju. 1997. h.71

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Dari kerangka pemikiran di atas, dijelaskan bahwa penelitian ini memfokuskan pada tokoh Tomepayung sebagai Arajang Balanipa ke-II yang menggunakan (menyusun) strategi politik sewaktu kerajaan Balanipa dalam menghadapi perlawanan kerajaan Passokkorang. Hasil perlawanan tersebut, Balanipa berhasil menaklukkan kerajaan Passokkorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku :

- Abbas, Ibrahim. 1999. *Pendekatan Budaya Mandar*. Majene: Hijrah Grafika.
- Alimuddin, Muhammad Ridwan. 2005. *Orang Mandar Orang Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Amir, Muhammad. 2011. *Konflik Balanipa – Belanda di Mandar 1862-1872*. Makassar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Amir, Muhammad. 2018. *Assitalliang Tammajarra di Mandar Abad ke-16*. Makassar : Balai Pelestarian Nilai Budaya
- Amir, Muhammad. 2013. Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa, dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya Walasuji*, Vol. 3, No.1.
- Asdy, Ahmad. 2003. *Mandar Dalam Kenangan Tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa Ke-52*. Makassar: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Azis Syah, H.M. Tanawali. 1998. *Sejarah Mandar : Polmas, Majene, Mamuju*. Jilid III. Ujung Pandang : Yayasan & Quot ; Al-Azis.
- Canagara, Hafied. 2014. *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Husaini Usman. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ibrahim, MS. 1977. *Himpunan Catatan Sejarah Pitu Ulunna Salu - Hasil Seminar Sejarah Mandar X*. Tinambung Polmas.
- Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta. 1995.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Group
- Iqmal, Nur. 2016. *Kerajaan Balanipa pada Abad XVI – XVII*. Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora : UIN Alauddin Makassar
- Kartini, Kartono. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandiri Maju. 1996.

- Kila, Syahrir. 2014. Hubungan Kerajaan Gowa Dengan Kerajaan Balanipa Mandar, dalam *Jurnal Walasuji*, Volume 5, Nomor 2.
- Limbugau, Daud. 1987. Federasi Kerajaan-Kerajaan Lokal Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba'bana Binanga. Makalh pada Seminar Kebudayaan Mandar yang diselenggarakan di Polewali tanggal 25-28 November 1987.
- Lontar Pattodioloang di Mandar. Koleksi Museum Daerah Mandar di Majene.
- Mandra, A. Muis, 1987. Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar. Majene : Pemda Majene.
- Mandra, A. Muis, 1988. Masalah Budaya Mandar dan Agama Islam. Majene : Yayasan Saq-Adawang.
- Mandra, A. Muis, 1990. Mandar dan Bone dalam Lontarak Mandar. Majene : Yayasan Saq-Adawang.
- Mattulada, 1998. Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Makassar : Hasanuddin University Press.
- Muttalib, Abdul. 1977. Kamus Bahasa Mandar. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI.
- Paeni, Mukhlis. 2986. "Landasan Kultur Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar, Dalam Dimensi Sosial Bugis Makassar. Ujung Pandang : PLPIIS.
- Rahman, Darmawan Mas'ud, 1988. Puang dan Daeng, Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar. Ujung Pandang : Disertasi Program Pasca Sarjana - Universitas Hasanuddin.
- Saharuddin, 1977. Susunan dan Sistem Pemerintahan Balanipa Dahulu dalam Hubungannya dengan Kebudayaan Daerah Mandar dalam Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan. Ujung Pandang – Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Saharuddin, 1985. Mengenal Pitu Ba'bana Binanga (Mandar) dalam Lintasan Sejarah Pemerintahan Daerah di Sulawesi Selatan. Ujung Pandang : CV. Mallomo Karya.
- Sanafiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3
- Sinrang, A. Syaiful. 1994. Mengenal Mandar Sekilas Lintas. Ujung Pandang-Pemerintah Daerah Tingkat II Majene.

Sjam, A.M. Sarbin. 1990. Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan Fungsi-Fungsi Pejabatnya. Tinambung : Depdikbud.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta : Bandung

Syah, M.T. Aziz. 1997. Sejarah Mandar Jilid I, II dan III. Ujung Pandang : Yayasan Al Aziz.

## **2. Sumber Internet :**

- <http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/>
- <http://budaya-indonesia.org/Tata-Pemerintahan-Amaradiang-Balanipa/>
- <http://fisip.uns.ac.id/blog/ori/2012/03/03/a-realibilitas-dan-validitas-pengukuran>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan\\_Balanipa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Balanipa)
- [kacomandar.blogspot.com](http://kacomandar.blogspot.com)

- <http://mandarnews.com/2018/08/29/wilayah-kekuasaan-kerajaan-balanipa/>
- <http://muhammadhamkahalim.blogspot.nl/2014/09/sejarah-singkat-daerah-mandar-tomakaka.html>

- <http://sulobassi.blogspot.nl/2015/09/passokkorang-siapa-kah-engkau.html>

- <http://suryabalanipamandar.blogspot.com/>
- <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sulawesi/kerajaan-balanipa/61539-2/>
- [http://www.Academia.Edu/9736601/Makalah\\_Politik\\_Dan\\_Strategi\\_Nasional](http://www.Academia.Edu/9736601/Makalah_Politik_Dan_Strategi_Nasional)
- <https://www.facebook.com/mandar>

## **3. Sumber Wawancara :**

- Dalif (Akademisi dan Pegiat Budaya)
- H. Ahmad Asdi (Penulis dan Budayawan Mandar)
- H. Darmansyah (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Sulbar);
- Muhammad Ridwan Alimuddin (Penulis dan Peneliti Budaya)
- Tammalele (Aktivis dan Budayawan Mandar)